



**News Title :** Lakukan Literasi Keuangan Bidang PBK di Bali, Kemendag Tegas Lindungi Masyarakat

**Media Name :** kumparan.com

**Journalist :** -

**Publish Date :** 30 April 2024

**Tonality :** Positive

**News Page :**

**News Value :** 0

**Resources :** Fajarini Puntodewi (Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga), Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti)

**Ads Value :** 0

**Section/Rubrication :** Bisnis

**Topic :** Literasi Keuangan PBK

**Lakukan Literasi Keuangan Bidang PBK di Bali, Kemendag Tegas Lindungi Masyarakat**



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Kementerian Perdagangan terus berkolaborasi melindungi masyarakat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi (PBK). Salah satunya dengan penguatan ketersediaan akses (inklusif) dan literasi keuangan kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di The Mers Sauer, Denpasar, Bali, Selasa (23/4).

Kialar tersebut bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat serta perlindungan konsumen di sektor keuangan di Gianyar, Bali.

"Melalui tiga instrumen yaitu PBK, sistem resi gudang (SRG), dan pasar uang komoditas (PLK), Bappebti turut menjaga likuiditas dan literasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penguatan pemahaman terkait PBK, SRG, dan PLK, penguatan literasi yang mulai dari tepat sasaran dengan berbagai media, penguatan layanan informasi dan edukasi, serta penguatan pengawasan berbasis digital," terang Fajarini.

Upaya Bappebti dalam perlindungan masyarakat dilakukan dengan pembelajaran langsung strategis. Langkah strategis dimaksud meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi informasi dan kompetensi PBK.

Bappebti juga melaksanakan peningkatan kualitas literasi, penerapan rating piagam berjangka, pemeliharaan nilai dan nilai legal, serta kolaborasi dan kerja sama nasional sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKTI).

Bappebti ambil peran di forum internasional dengan menjadi koordinator pembi Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF). Fajarini mengungkapkan, Komite Reses DPR RI Komisi VI ini sejalan dengan komitmen Kemendag untuk penguatan capaian perdagangan dalam negeri.

Diapresiasi pula peningkatan ekspor nonmigas serta kompetensi SDM perdagangan melalui berbagai program prioritas di 2024. Kemendag mengproseksi Komisi VI DPR RI yang akan fokus pada penanganan upaya Bappebti dan Dijen PKTN dalam inklusi dan literasi kepada masyarakat serta perlindungan konsumen sektor keuangan.

"Selain Bappebti, Dijen PKTN juga melakukan literasi, baik langsung maupun tidak langsung kepada konsumen serta lembaga perlindungan konsumen dan pelaku usaha dengan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait," ungkap Fajarini.

**Maaf Persebaran Berita dalam Koper Pelaku Aspek Penting Perubahan untuk Maaf**

Untuk melindungi konsumen, dilakukan pula intensifikasi pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct) berbasis risiko, penegakan hukum yang memprioritaskan pada pemulih hak konsumen, dan perlindungan data nasabah," lanjutnya.

Fajarini juga melaporkan capaian Kementerian Perdagangan selama 2023 dan proyeksi 1 2024. Struktur neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Februari 2024 tercatat USD 2,87 miliar. Infasi pangan minali terkumulasi pada 2024 hingga Maret dengan komoditas penyebab inflasi didominasi komoditas pangan berkapasitas, di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan, Bali merupakan salah satu wilayah potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan keuangan. Terlebih pada 2020 alam melalui gudang SRG, Bali berhasil mengedukasi dan mempromosikan, dan cabalang dengan volume 12 ton ke Korea Selatan.

Terdapat lima kantor cabang piagam berjangka di Bali dan akan didorong transaksi multilateral untuk komoditas emas, kopi, dan kakao untuk mendukung kinerja perdagangan berjangka. Pada 2023 melalui kolaborasi dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto (ASPARKINDO), Bappebti menggelar Konferensi Asia pada 24-25 Agustus 2023.

"Bappebti perlu melakukan terobosan guna memberikan literasi yang efektif kepada masyarakat Bali terkait perdagangan berjangka. Di samping itu, perlu dilibatkan upaya mitigasi risiko perdagangan aset kripto mengingat banyaknya titik trading di Bali yang tidak mematuhi ketentuan larangan bertansaksi aset kripto," jelas Aria.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengungkapkan, inklusi keuangan erat kaitannya dengan upaya Bappebti dalam mendorong perdagangan aset kripto yang marak diminati masyarakat, terutama kaum Milenial dan Gen Z.

"Perdagangan aset kripto bersifat high risk, high return, dan penah ketidakpastian sehingga literasi harus masif dilakukan. Meskipun produk aset ini terdiri berbagai literasi, masyarakat tetap harus waspada dengan segala kemungkinan yang ada. Sebagai upaya mitigasi risiko, Bappebti melakukan penguatan ekosistem yang telah ada.

Artinya, proses pembelian dan pengawasan menjadi bertahap dan didukung sistem yang terintegrasi dari pedagang, Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, Depository, dan Bappebti.

Olvy juga memberikan keterangan terkait perubahan kewenangan pengawasan, pembelian dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), saat ini, tengah berlangsung proses finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU PPSK tersebut.

Bappebti terus berupaya meningkatkan penguatan ekosistem aset kripto dan mendorong para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang saat ini ada 31 perusahaan untuk segera menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAS).

"Hal ini agar pengalihan kewenangan nasional berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan goncangan pada industri. Hal ini selaras dengan arahan dari Komisi VI DPR RI," rump Olvy.